

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi yang dahulu ke generasi selanjutnya agar nilai-nilai pendidikan tersebut tetapi terpelihara dan terjaga bahkan butuh dikembangkan. Dengan demikian, keberadaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran pemerintah sebagai penguasa. Hal ini karena kompleksitas penyelenggaraan pendidikan yang terus berlanjut serta pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat beragam dan membutuhkan campur tangan pemerintah.

Disamping itu masyarakat memiliki keterbatasan, sedangkan pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan yang dapat menjamin keberadaan dan keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan apabila proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai berbagai macam konflik dan pertentangan serta dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang sulit ditangani oleh masyarakat sehingga intervensi pemerintah berupa kebijakan yang diharapkan menjadi solusi terbaik.¹

Dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia dewasa ini, pendidikan cenderung diartikan sebagai usaha sadar untuk membantu perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan. Secara lebih umum,

¹Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 30.

pendidikan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pembimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh pendidik kepada peserta didik kearah suatu tujuan tertentu.²

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan keberagaman, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan pendidikan, khususnya bab 14 pasal 50 menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.³

Dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi di bidang pendidikan tidak hanya terhenti pada tingkat kabupaten dan kota tetapi lebih jauh yaitu sampai pada tingkat sekolah. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan kelevel sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya.

²Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 5.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, bab 14, pasal 51.

Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi agar mereka lebih memahami kompleksitas pendidikan, membantu serta turut mengontrol pengelolaan pendidikan. Adapun kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula mendapat perhatian oleh sekolah. Dengan demikian, sekolah dituntut memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah, karena keduanya merupakan penyelenggara pendidikan di sekolah.⁴

Pengelolaan sekolah secara tidak profesional dapat menghambat langkah sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan sekolah secara efektif dan efisien. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi. Perumusan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan pengelola sekolah, agar sekolah memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan.

Harapan masyarakat pada umumnya telah bergeser dari sekadar memperoleh pendidikan dalam arti pemerataan memperoleh pendidikan kepeningkatan mutu pendidikan, karena dirasakan memperoleh pendidikan dengan mutu seadanya tidak mampu meningkatkan persaingan yang berarti, dan

⁴Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 5.

pada gilirannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan.⁵ Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan pada tingkat pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif dalam sistem otonomi pemerintahan dapat melihat mana kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, mana kebijakan yang tepat.

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang harusnya memihak atas kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan para pengambil kebijakan. Olehnya itu, dibutuhkan pendekatan yang profesional baik pada pihak pemerintahan maupun pada pihak sekolah. Dengan adanya perhatian terhadap aspek profesional ini maka kebutuhan masyarakat bisa saja terpenuhi atas kesesuaiannya antara kebutuhan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sekolah harus bisa menunjukkan bahwa urusan pendidikan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, terencana, terkontrol, dan bermutu. Sehingga, baik pada tingkat pemerintahan maupun pada tingkat sekolah harus mengelola pendidikan secara profesional, dengan begitu kita dapat memperoleh pendidikan yang bermutu.

Bicara tentang menciptakan pendidikan yang bermutu maka tak lepas dari visi dan misi dari lembaga pendidikan itu sendiri, semakin kuat visi dan semakin baik misinya maka akan semakin berkualitas juga sumber daya manusia yang dapat dihasilkan. Peran dari seorang guru sangatlah penting dan juga sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan potensi sumber daya manusia dan juga dalam menjalankan visi dan misi sekolah. Setiap pendidik wajib memahami dan mengerti tentang visi dan misi sekolah tempat dia mengabdikan karena semua itu dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan menentukan

⁵Syaiful Sagala, "Pengantar", *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Cet. VII; Bandung Alfabeta, 2013), h. 6.

kemajuan dari sekolah, jika pendidik tidak mengerti visi dan misi dari sekolah bisa berakibat kemunduran bahkan kegagalan dalam sekolah.

Dalam proses manajemen salah satu tugas kepala sekolah ialah membenahi semua fungsi manajemen dengan baik, supaya tujuan optimal dapat dicapai. Salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah mampu merumuskan visi dan misi sekolah yang dipimpinnya. Karena visi sekolah erat kaitannya dengan siswa maka proses pendidikan harus fokus pada pelayanan yang baik kepada siswa, bukan hanya kepada pejabat dinas pendidikan, dan kepala sekolah. Sehingga, siswa harus dilayani dengan penuh perhatian agar merasa nyaman dan bahagia dalam belajar serta dengan senang hati dan penuh kesungguhan untuk meraih masa depannya masing-masing.

Oleh sebab itu kepala sekolah diharapkan mampu untuk mendayagunakan kemampuan untuk menggerakkan unsur-unsur yang ada di dalam sekolah. Sebagaimana dicantumkan dalam firman Tuhan Alqur`an surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.⁶

Ayat tersebut menunjukkan ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) harus dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT, dan RasulNya. Kata “*al amr*” dalam ayat itu artinya: urusan, persoalan, masalah, perintah. Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu tugas utamanya dan kesibukan sehari harinya yaitu mengurus

⁶ Qur'an surat An-Nisa Ayat 59

persoalan rakyatnya, menyelesaikan problematika yang terjadi di tengah masyarakat serta memiliki wewenang mengatur, mengelola dan menyuruh bawahan.⁷

Suatau kebijakan sekolah dibuat oleh orang yang terpilih bertanggung jawab untuk membuat kebijakan pendidikan, dewan sekolah dan unsur lainnya yang diberi kewenangan membuat kebijakan, baik kepala sekolah maupun pengawas, atau administrator lainnya yang memiliki kewenangan mengelola kebijakan dari dewan sekolah, kebijakan seorang pemimpin pada lembaga pendidikan seringkali menjadi titik perhatian para ahli, baik dibidang ilmu pengetahuan itu sendiri ataupun bidang disiplin ilmu lainnya.

”Dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kepala madrasah sebagai penanggungjawab utama keberadaan sebuah lembaga pendidikan. Untuk itu perlu mengkaji kembali kebijakan yang dibuat oleh kepala madrasah dalam peningkatan kompetensi pedagogik dan kekompetensi kepribadian guru sehingga dapat mengembangkan guru yang lebih profesional dalam bidangnya . dan tak lupa juga dengan kompetensi kepala madrasah yang harus ada pada diri setiap pemimpin pendidikan (kepala madrasah) yaitu kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.”⁸

Menciptakan pendidikan yang bermutu maka tak lepas dari visi dan misi dari lembaga pendidikan itu sendiri, semakin kuat visi dan semakin baik misinya maka akan semakin berkualitas juga sumber daya manusia yang dapat dihasilkan (*ouput*). Peran seorang guru sangatlah penting dan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan potensi sumber daya manusia dan juga dalam menjalankan visi dan misi madrasah.

⁷R Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Pustaka Nawaitu, 2004), h. 14.

⁸Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007, *Tentang Standar Kepala Madrasah*.

Namun, peneliti telah mengamati bahwa di sekolah ini masih belum melaksanakan suatu kebijakan yang telah diputuskan secara maksimal. Salah satu kebijakan yang telah diputuskan yaitu visi dan misi sekolah untuk kedepannya.

Tapi setelah kebijakan tersebut telah dirumuskan dan ditetapkan, visi dan misi belum juga terlaksana secara maksimal. Semua itu dapat terlihat dari proses kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, serta hasil dari peserta didik selama menjalankan pendidikan di sekolah tersebut. Terlaksananya visi dan misi sekolah sangat berkaitan dengan kepala sekolah, guru, komite, dan peserta didik yang profesional dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan.

Terkait dengan judul penelitian ini “Manajemen Kebijakan Pendidikan Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Di Madrasah Aliyah Manbaul Ulum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar” maka terlebih dahulu penulis ingin mengetahui bagaimana konteks kebijakan dalam pencapaiannya di sekolah tersebut dan mengetahui visi dan misi sekolah serta bagaimana kebijakan pendidikan dalam mengambil peran dalam pencapaian visi dan misi.

B. Definisi Operasional

Definisi fokus merupakan penegasan untuk menjabarkan fokus penelitian terkait batasan masalah yang akan diteliti dari peranan manajemen kebijakan pendidikan dan pencapaian visi dan misi mulai dari variabel manajemen kebijakan pendidikan serta visi dan misi sekolah. Adapun deskripsi fokusnya sebagai berikut:

1. Manajemen Kebijakan Pendidikan

Manajemen mengandung arti sebagai suatu proses kegiatan usaha mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kemahiran dan kebijaksanaan seorang kepala sekolah dalam membuat keputusan. Serta pendidikan merupakan usaha dasar yang dilakukan keluarga, masyarakat dan pemerintahan, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran yang berlangsung di sekolah.

Berdasarkan penjabaran di atas maka manajemen kebijakan pendidikan adalah kemahiran dan kebijaksanaan seorang pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan melalui pertimbangan yang didasarkan atas ketentuan dari pimpinan, pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman dalam membuat keputusan yang selanjutnya menjadi dasar untuk mengoperasikan pendidikan.

2. Perumusan kebijakan pendidikan

Perumusan kebijakan pendidikan merupakan tahap urgen dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama. Tahap perumusan kebijakan melibatkan aktivitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir.

3. Sistem pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.⁹ Dengan demikian sistem pengambilan keputusan merupakan kegiatan dalam memilih alternatif solusi yang tepat dari berbagai alternatif yang ada dengan mempertimbangkan hasil yang maksimal.

4. Implementasi kebijakan pendidikan

Implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.¹⁰

Dengan demikian, maka implementasi kebijakan pendidikan merupakan aktualisasi kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan disahkan.

5. Visi dan Misi

Visi merupakan cita-cita sekolah dan gambaran masa depan yang diinginkan bersama dan misi merupakan program untuk mewujudkan visi tersebut.

⁹Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*, (Cet. III; Bandung: Alfabeta 2012), h. 104.

¹⁰Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 132.

Maksud dalam penelitian ini adalah bahwa Manajemen Kebijakan Pendidikan Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Di Madrasah Aliyah Manbaul Ulum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Manajemen kebijakan pendidikan dalam pencapaian visi dan misi Madrasah Aliyah Manbaul Ulum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan dalam mencapai visi dan misi di Madrasah Aliyah Manbaul Ulum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen kebijakan dalam pencapaian visi dan misi di Madrasah Aliyah Manbaul Ulum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian visi dan misi di Madrasah Aliyah Manbaul Ulum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

E. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi ini adalah karena penulis menyadari bahwa dalam mengelola suatu lembaga pendidikan memerlukan kebijakan untuk mampu menciptakan masa depan yang lebih baik. Menciptakan kebijakan pendidikan yang tepat sesuai dengan tujuan sekolah yang tertuang dalam visi dan misi sekolah yang telah di tetapkan.

F. Manfaat Penelitian

Signifikan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan kepemimpinan kependidikan terkait dengan kebijakan visi dan misi di sekolah.
- b. Secara konseptual dapat memperkaya khazanah kepustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, khususnya Jurusan Manajemen Pendidikan Islam terkait dengan pemasaran jasa pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai kepemimpinan kepala madrasah dalam mengembangkan nilai-nilai Islam. Serta mengembangkan diri peneliti agar berperilaku yang mencerminkan akhlaqul karimah.
- b. Bagi kepala madrasah, dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan budaya sekolah lebih baik.
- c. Bagi pendidik, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mendidik, menanamkan nilai-nilai islami dalam setiap pengajaran yang diberikan kepada peserta didik
- d. Bagi orang tua, dan masyarakat untuk memberikan pengetahuan mengenai pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan akhlak peserta didik dan masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun peneliti terdahulu yang dijadikan pendukung dan penganut bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Anna Lisana Yudianti 2018, *Implementasi Visi Dan Misi Sekolah Dalam Membina Karakter Religius Siswa (Studi Komparasi di SMP N 8 Yogyakarta dan SMP N 1 Yogyakarta)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, implementasi visi dan misi sekolah dalam membina karakter religius siswa di SMP N 8 Yogyakarta dan SMP N 1 Yogyakarta dijabarkan melalui indikator-indikator yaitu konsep, program, pelaksanaan, dan evaluasi. Program-program keagamaan yang dijabarkan dari visi dan misi sekolah sudah terimplementasi dengan baik. Terlaksananya integrasi nilai-nilai religius dengan berbagai bidang keilmuan, dan prestasi dalam bidang keagamaan. Analisis komparasi dari kedua sekolah menunjukkan kesamaan walaupun ada beberapa perbedaan di bagian program, pelaksanaan dan evaluasi. Kedua, Tingkat keberhasilan implementasi visi dan misi sekolah dalam membina karakter religius siswa di SMP N 8 Yogyakarta dan SMP N 1 Yogyakarta secara umum sudah berhasil. Semua warga sekolah berperan dalam keberhasilan program sekolah, masing-masing mempunyai peran dan tupoksinya. Indikator keberhasilannya adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan rukun dengan pemeluk agama lain.

2. Arum Tina Fitri, 2018. *Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengimplementasikan Visi Misi Melalui Islamic Parenting Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan*. Merumuskan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal sekolah. Tujuan yang hendak dicapai oleh kepala sekolah disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang dilakukan sekolah. Analisis internal dilakukan kepala sekolah dengan melihat kekuatan dari dalam dan kelemahan dari dari organisasi sekolah. Analisis eksternal dilakukan dengan melihat peluang dan ancaman yang mungkin terjadi dari luar sekolah. Perwujudan visi misi melalui islamic parenting untuk meningkatkan mutu kelulusan diwujudkan dengan. Penentuan waktu kegiatan, pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan visi misi melalui islamic parenting, diantaranya masa orientasi siswa, forum kelas, membangun komitmen kepada orang tua siswa, dan home visit.
3. Dwi Sukaningtyas, Djam'an Satori, & Udin Syaefuddin Sa'ud: *Pengembangan Kapasitas Manajemen Sekolah Dalam Membangun Pemahaman Visi Dan Misi*. Pengembangan kapasitas manajemen sekolah pada akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan mutu layanan sekolah. Mutu layanan sekolah diukur berdasarkan ketercapaian visi dan misi. Karena pada intinya mutu layanan sekolah adalah mutu kinerja organisasi yang digambarkan melalui kinerja manajemennya.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, terdapat pokok masalah yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan

permasalahan yang penulis teleti. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada. “Manajemen kebijakan pendidikan dalam pencapaian Visi dan Misi di Madrasah Aliyah Manbaul Ulum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar”

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berdasarkan buku panduan penelitian skripsi UIN Antasari Banjarmasin, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis yang memuat tentang Manajemen Kebijakan Pendidikan, Visi Misi, dan Kebijakan Pendidikan dalam Pencapaian Visi dan Misi.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian terdiri dari gambaran singkat lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V berisikan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.